

GLOBALISASI DAN KEMISKINAN DESA: ANALISA STRUKTUR EKONOMI POLITIK PEDESAAN

GLOBALIZATION & VILLAGE POVERTY: AN ANALYSIS OF ECONOMIC-POLITICS IN RURAL AREA.

Wasisto Raharjo Jati

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta
E-mail: wasisto.raharjo.jati@gmail.com

Diterima: 6 Agustus 2014; direvisi: 11 September 2014; disetujui: 20 Oktober 2014

Abstract

This article aims to analyze political linkage between village and globalization. The analysis emphasizes the economic-political structure in order to assess its relations, especially village standing position toward globalization. The result shows that historically, the influence of globalization can be assessed into positive and negative perspectives. In positive paradigm realm, village have embraced global strategies in order to enhance their economic effort. Meanwhile, negatively, village has been marginalized and suppressed by capitalist system.

Keywords: *village, globalization, economic-politic, global village.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis relasi politik antara desa dengan globalisasi. Analisa dalam artikel ini kemudian dititikberatkan pada struktur ekonomi politik untuk melihat relasinya khususnya posisi desa dalam globalisasi. Hasil paper menunjukkan bahwa secara historis, analisa terhadap pengaruh desa dalam globalisasi sendiri dapat dibedakan menjadi dua paradigma yakni positif dan negatif. Dalam perspektif positif, desa sendiri mengafirmasi berbagai strategi global dalam upaya membangun ekonomi mereka. Sedangkan dalam pengertian negatif, desa telah menjadi termarginalkan dan tertekan dalam sistem kapitalis.

Kata Kunci : desa, globalisasi, ekonomi politik, desa global.

Pendahuluan

Perbincangan mengenai diskursus perekonomian di pedesaan sendiri sangatlah kompleks dan dinamis. Secara umum, bangunan perekonomian pedesaan sendiri masih bersifat subsisten dan berbasis mikro ekonomi yang berasal dari usaha ekstraktif pertanian. Namun demikian, premis tersebut juga tidak bisa dijadikan generalisasi dalam melihat pedesaan. Ada desa yang berhasil untuk mereformasi struktur perekonomian yang dulunya bersifat subsisten menjadi konsisten dengan memanfaatkan jaringan eksternal. Namun, ada pula desa yang masih terjebak

dalam perekonomian subsisten sehingga tidak bisa berkembang sama sekali. Adanya kondisi dikotomis tersebut sebenarnya terletak pada kondisi eksternalitas yang mempengaruhi kondisi perekonomian di desa tersebut. Kondisi eksternalitas yang dimaksudkan adalah fenomena globalisasi yang menginfiltrasi segala lini kehidupan. Hal itulah yang kemudian mendorong desa sendiri perlu untuk siap membangun survivalitas dan durabilitas dalam menghadapi adanya pengaruh luar tersebut.

Diktum globalisasi yang mewacanakan adanya “glokalisasi” yakni mempertautkan

adanya pertemuan global dan lokal dalam satu arena sama memang memberikan arena deliberasi yang kompetitif untuk masing-masing aktor tersebut. Tesis yang selalu digemakan dalam konsepsi tersebut adalah *trickle-down effect* yakni adanya redistribusi kue ekonomi yang dihimpun dalam sebuah cawan yang besar secara setara dan seimbang yang merembes dari atas ke bawah. Pertanyaan skeptis yang perlu diajukan dalam menganalisa globalisasi tersebut adalah bagaimana implikasi ekonomi-politik yang didapatkan dari pola sirkulasi *trickle-down effect* tersebut.

Premis mengenai *trickle-down effect* sendiri setidaknya mengalami perdebatan teoritis dalam berbagai mazhab teori pembangunan. Poin pertama, apakah redistribusi kue perekonomian itu sendiri berjalan seimbang dan setara?. Poin kedua adalah, apakah terjadi keseimbangan yang setara antara desa dengan kota. Kasus globalisasi di pedesaan sendiri menjadi menarik terjadi untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan struktur ekonomi politik di pedesaan. Studi-studi awal mengenai kondisi ekonomi politik mayoritas mendudukan desa sebagai bagian dari subordinasi dari negara. Hal itulah yang menjadikan otonomisasi ekonomi dari sebuah desa sendiri menjadi sangat relatif. Terlebih apalagi hal tersebut dikaitkan dengan konteks kebijakan publik. Maka desa menjadi subjek pasif dari sebuah produk kebijakan publik represif tersebut. Hal itu pula yang tercermin dalam berbagai macam produk legal hukum yang mengatur perundangan desa semenjak UU No. 5 Tahun 1979 hingga yang terbaru sekarang ini. Adapun UU Desa yang baru yakni UU No. 5 Tahun 2014 banyak memberikan independensi maupun bentuk liberalisasi lainnya seperti halnya pembentukan Badan Usaha Desa, maupun adanya penyaluran uang (monetisasi) yang begitu masif melalui anggaran desa yang banyak.

Tulisan ini akan mengelaborasi secara lebih lanjut mengenai dampak globalisasi yang akan berlangsung di pedesaan terutama bagaimana bentuk pengaruh globalisasi terhadap struktur ekonomi politik di Indonesia yang kemudian berimplikasi pada kemiskinan yang berada di pedesaan?. Tulisan ini akan menginisiasi pembahasan mengenai permasalahan kemiskinan

dari kajian-kajian terdahulu bagaimana konstelasi ekonomi politik desa.

Struktur Ekonomi-Politik Pedesaan: Hadirnya Negara ke Desa

Memperbincangkan mengenai ekonomi politik pedesaan di Indonesia memang tidaklah terlepas dari lingkup kebijakan publik di suatu negara. Adanya pengaruh negara ke desa yang dilakukan secara legal formal inilah berimplikasi banyak pada perubahan besar terkait dengan independensi desa dalam mengatur perekonomiannya sendiri. Secara garis besar, desa merupakan entitas sosio ekonomi yang merdeka dan terbebas sama sekali dari pengaturan negara. Adapun pelbagai macam studi antropologis yang mengkaji tentang desa seperti yang dilakukan oleh Duto Sosialismanto pada tahun 2006 berjudul *Hegemoni Negara, Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*, sendiri melihat proses ekonomi politik yang berlangsung di pedesaan sendiri bernuansa kapitalisme periferi.¹ Hal itu dikarenakan moda dan alat produksi dalam melakukan aktivitas kegiatan perekonomian di pedesaan sendiri masih bercorak ekstraktif dan subsisten. Adapun nilai lebih yang dihasilkan dari proses produksi sedemikian tersebut hanyalah bersifat mikro material. Oleh karena itulah, adanya upaya improvisasi terhadap peningkatan faktor produksi maupun moda produksi sendiri masih sangatlah minim.

Ada beberapa poin yang bisa dipetik yakni: 1) Proses redistribusi material ekonomi sendiri berjalan secara seimbang dan setara dengan memanfaatkan modal sosial antar sesama warga Negara; 2) Penyaluran dana di pedesaan yang masih mikro menjadikan ketimpangan ekonomi sendiri sangatlah minim terjadi. Hal itulah yang bisa kita simak dari perkembangan kearifan lokal dalam pengaturan redistribusi perekonomian di desa seperti halnya *lumbung*, *banjar*, dan lain sebagainya. Artinya, dengan adanya kearifan lokal tersebut, perekonomian diatur oleh pedesaan secara adil dan seimbang. Adapun potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa sendiri sejatinya memiliki potensi sumber daya ekonomi besar dalam bentuk pengusahaan ulayat.

¹ Duto Sosialismanto, *Hegemoni Negara, Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2006), hlm. 37.

Dalam rezim pengaturan sumber daya ekonomi di tingkat pedesaan sendiri dikenal sebagai istilah *common pool resources*. Istilah ini sendiri diartikan sebagai bentuk pengelolaan bersama yang dilakukan oleh setiap anggota komunitas masyarakat. Dalam mekanisme pengelolaan bersama tersebut, setiap anggota masyarakat sendiri memiliki cara untuk memastikan bahwa sumber daya alam sendiri terbagi secara merata.²

Peran aktif yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam menjamin ketersediaan masyarakat tersebut merupakan cara efektif dalam mengamankan sumber daya ekonomi berjalan seimbang. *Common Pool Resources* tersebut sejatinya merupakan bagian dari ketiga rezim pengaturan sumber daya ekonomi seperti halnya *state way* maupun *market way*. Adapun *state way* sendiri lebih mengedepankan adanya pengaturan negara dalam pengaturan redistribusi tersebut.³ Pengaturan oleh negara sendiri lebih bisa fleksibel dan dilakukan secara simultan dan gradual. Hal inilah yang menjadi karakteristik khas dari sebuah negara untuk melakukan monopoli tunggal atas pelayanan publik tersebut. Artinya negara menisbikan adanya peran negara sendiri dalam melakukan pengaturan tersebut. Hal itulah yang menjadikan peran masyarakat sendiri kemudian dikucilkan dalam arena tersebut karena ekonomi sendiri masuk dalam domain negara secara penuh dan absolut. Masyarakat tidak lagi memiliki pilihan lain selain memilih pengaturan sumber daya yang dikuasai negara. Pasar sebagai aktor kedua dalam pengaturan sumber daya ekonomi memang memberikan banyak pilihan bagi masyarakat untuk bisa memilih, namun juga disesuaikan dengan rasionalitas harga yang sedemikian tinggi pula.

Adanya kepemilikan sumber daya yang masif dan besar dimiliki oleh desa itulah yang menjadi polemik. Dominasi negara sudah berjalan di desa sebelum menginjak pada globalisasi pada abad ke-21 sekarang ini. Otonomisasi dan independensi desa sebagai entitas yang merdeka

kemudian tergerus oleh pengaruh negara. Setidaknya hal tersebut dapat diindikasikan dengan pola penetrasi yang dilakukan oleh negara untuk mensubordinasikannya sebagai objek pengaturan negara. Tentunya praktik hegemoni negara yang demikian bukanlah barang baru dalam relasi negara dengan desa. Hal itu sebenarnya dapat dilihat mundur ke belakang pada masa kolonialisme Belanda.

Adapun transformasi perekonomian desa semasa negara kolonial dimulai dari diundangkannya *Agrarische Wet* maupun *Suiker Wet* pada tahun 1870 dimana pola industrialisasi yang digencarkan terutama pada sektor agroindustri seperti halnya perkebunan maupun pertanian secara gradual telah mulai menancapkan taringnya ke dalam hubungan sosio ekonomi desa pada waktu itu. Ditengarai bahwa pola feodalisme maupun merkantilisme menjadi fondasi awal prakapitalis yang berkembang di pedesaan hingga menjelang fase kemerdekaan. Dalam implementasinya, negara kolonial menjadikan desa sebagai basis ekonomi industri kolonial yang kemudian membawa berbagai macam implikasi yang hadir dalam konteks pedesaan.

Adapun berbagai macam implikasi tersebut paling utama adalah restrukturisasi agraria sebagai sumber daya dasar berdirinya industrialisasi perkebunan maupun pertanian di pedesaan. Dalam hal ini, program restrukturisasi tanah yang dilakukan secara permisif akan mengancam kedudukan tanah sebagai sumber daya desa seperti halnya kepemilikan hak ulayat, hak *apanage*, dan lain sebagainya. Adapun efek domino dari restrukturisasi tanah tersebut kemudian membawa isme-isme lain yang dibawa negara kolonial kepada desa seperti halnya monetisasi, komoditisasi, modernisasi, dan lain sebagainya yang kemudian mengakibatkan kapitalisme lanjutan terus mereduksi otonomi desa sebagai entitas ekonomi.

Kemudian hal itu menimbulkan involusi pertanian dimana terjadi pengurangan lahan pertanian besar-besaran untuk pendirian pabrik maupun infrastruktur lainnya serta transformasi warga desa yang dulunya petani tulen kini beralih menjadi buruh pabrik dikarenakan semakin menyempitnya lahan pertanian di Jawa

² Garret Hardin, "Tragedy of the Commons", *Science New Series*, Vol. 162, No. 3859, 1968, hlm. 1250.

³ Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, (Cambridge: Cambridge, University Press, 1990).

seiring dengan adanya kapitalisasi pertanian dan ledakan penduduk yang naik secara gradual. Pada dasarnya, tujuan involusi pertanian sendiri baik yakni mendorong adanya ekspor hasil pedesaan sendiri ke dalam ranah global. Namun perlu juga mencermati untuk mengelaborasi lebih lanjut mengenai pembahasan tesis Clifford Geertz pada tahun 1976 mengenai “Involusi Pertanian” sendiri menarik untuk dikaji. Geertz menilai dampak kapitalisme global banyak memberikan andil terhadap perubahan struktur perekonomian global.⁴ **Pertama**, hadirnya monetisasi dan kapitalisasi desa sendiri tidaklah ikut merubah tatanan ekonomi desa tersebut. Kapital sendiri hanya berjalan pada proses produksi hingga konsumsi. Hal inilah yang kemudian menciptakan adanya dualisme ekonomi yakni pada satu sisi, kapitalisasi telah merombak sector produksi dan industrialisasi agraria, namun di satu sisi tetap mempertahankan adanya perekonomian berbasis subsisten. **Kedua**, adanya bentuk upaya subsistenisasi terhadap petani tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan secara konservatif kelas petani yang miskin. Implikasinya kemudian adalah menciptakan adanya dua kelas petani yang berbeda yakni *peasant* maupun *farmer*. Adapun kelas *farmer* sendiri memiliki alat dan moda produksi yang masif sedangkan *peasant* sendiri adalah kelas petani yang subsisten dengan mengandalkan pada faktor produksi yang sedikit. Hal itulah menjadikan kelas *peasant* sendiri kemudian menjadi sulit berkembang. Adanya konteks nilai lebih (*added value*) inilah yang menjadi diferensiasi atas kedua kelas. Kelas *farmer* dibentuk atas kapitalisasi instan yang kemudian mengukuhkan adanya kelas-kelas tuan tanah menjadi kelas kapitalis. Dampak dari dibentuknya kedua kelas tersebut adalah munculnya guremisasi di masyarakat. Kelompok petani desa gurem inilah yang menjadi titik-titik awal involusi pertanian di desa⁵.

Ketiga, adanya guremisasi itulah yang menjadikan sektor pendapatan di desa sendiri

⁴ Clifford Geertz, *Involusi Pertanian*, (Jakarta: Bharata Aksara, 1976), hlm. 34.

⁵ Riza Sihbudi & Moch. Nurhashim (eds.), *Kerusuhan sosial di Indonesia : Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 28.

kurang berkembang dan stagnan sehingga tidak ada sama sekali improvisasi dalam kehidupan. Hal paling kentara yang penting untuk dicermati adalah transisi nilai-nilai budaya dalam internal desa itu sendiri. Perekonomian desa yang sebelumnya bersifat komunalistik dan kooperatif lantas kemudian diubah menjadi kelas-kelas yang individualistik dan liberal. Pola redistribusi perekonomian yang dulunya dilakukan secara seimbang dan setara mulai bergeser pada rasionalitas uang. Bahwa uang sendiri mejadi kunci atas pola pembagian tersebut.

Akar untuk memahami globalisasi dalam tingkat pedesaan adalah bagaimana kita juga melihat konteks di masa lalu bahwa globalisasi sekarang ini merupakan bentuk kolonialisme di masa lalu. Maka penting juga untuk disimak untuk melihat konteks keterbelakangan (*underdevelopment*) yang terjadi di ranah pedesaan saat era zaman kolonialisme. Desa adalah entitas ekonomi mikro sedangkan negara kolonial adalah entitas kapitalisme makro. Keduanya bersinergi dalam relasi simbiosis parasitisme. Negara hadir sebagai parasit atas tatanan perekonomian desa yang kian involutif.

Namun demikian, mencermati fondasi dasar atas perkembangan ekonomi di desa sendiri juga perlu melihat adanya karakteristik dari negara kolonial itu sendiri. Dalam hal ini, dibalik alasan neoklasik yang menjadi paradigma ekonomi negara kolonial bukanlah menjadi kapitalisme sungguhan (*real capitalism*) akan tetapi lebih menuju kepada ekonomi pinggiran dikarenakan karakter negara kolonial yang mengejar keuntungan dalam jangka pendek dengan cara mendisplinkan warganya terutama pedesaan yang mengakibatkan proletarisasi dan marjinalisasi warga desa karena praktik *trickle up effect* yang dilakukan negara kolonial sehingga pedesaan di Jawa umumnya mengalami keterbelakangan secara ekonomi (*underdevelopment*). Kondisi *underdevelopment* yang berlangsung dalam pedesaan dikarenakan adanya ketimpangan pembangunan yang terjadi di pedesaan akibat pola kebijakan yang eksploitatif.

Secara makro, konteks pengaruh negara di desa yang termanifestasikan dalam pola desa dilihat sebagai *self governing community* dikarenakan memiliki hak asal usul dan

bawaan sebelum negara hadir sehingga “desa” dipahami republik mini. Sekarang kemudian berubah menjadi desa” dilihat sebagai *local state government*. Hal ini dikarenakan adanya konsepsi *eigendom & property* atas tanah yakni penghapusan hak ulayat desa diganti dengan *landrent*. Selain itu, kepala “desa” ditempatkan sebagai kepanjangan pemerintah untuk memungut pajak natura tanah desa sekaligus menjalankan fungsinya sebagai administrator perekonomian kolonialisme. Pola patronase yang sedemikian kental kemudian mempengaruhi strategi kuasa yang cenderung hierarkis. Dalam hal ini, pamong desa melalui *Revenue Constitution* tahun 1814 bertindak sebagai agensi pemerintah kolonial dalam pemungutan pajak tanah dan upeti hasil pertanian lainnya dalam level administratif⁶. Sementara pada level politik, terdapat pola *rent seeking* yang dilakukan pamong desa yaitu memungut rente-rente yang tidak disetorkan kepada pemerintah Belanda sehingga pamong desa kemudian menjadi kelas terkaya dalam masyarakat “desa”. Pada level pemerintahan pun, pamong desa juga memiliki tanah *bengkok* dan tanah *pengarem – arem* yang jumlahnya berhektar-hektar dan hal itu pun dapat disewakan kepada kelompok petani garapan (*peasant society*) maupun dijual kepada petani hak milik (*farmer society*) sehingga kian mengukuhkan posisi pamong desa dalam strateginya mempertahankan kuasa.

Adapun pada masa kolonialisme Belanda, “desa” dilihat sebagai *local self-government & self-governing community* dimana pemerintah Belanda mulai mengakui “desa” sebagai persekutuan wilayah dihuni penduduk yang memiliki tanah yang dibuka pertama kali oleh komunitas tersebut. Dalam hal ini, pemerintah tidak berhak mengambil kuasa atas tanah tersebut sepanjang tanah tersebut tidak digunakan untuk kepentingan umum, bukan perekonomian/komersialisasi tanah. Artinya dalam hal ini, pemerintah Belanda mengakui hak ulayat “desa” atas kepemilikan tanah. Oleh karena itu, kemudian desa maupun persekutuan masyarakat lainnya terpecah menjadi dua

yakni *Zelfbestuurlandschappen* (swapraja) & *Volksgemeenschappen* (non swapraja).⁷

Pola feodalistik masih mewarnai corak desa dalam dua daerah tersebut. Hal itu bisa terlihat di tataran *Volksgemeenschappen*, dimana para tuan tanah yang sejatinya merupakan minoritas dalam masyarakat “desa” menjadi kelas penguasa yang dominan dimana dengan praktik komunalisasi tanah yang mereka lakukan mengkreasi adanya hubungan patrimonial yang kuat dengan masyarakat desa yakni adanya hak praktik sewa lahan dan hak pakai yang diberlakukan tuan tanah kepada masyarakat desa untuk menggarap lahannya. Sementara pada tataran *Zelfbestuurlandschappen*, kerajaan menjadi aktor dominan dalam “desa” melalui agen “bekel” dimana *bekel* sendiri memiliki posisi terhormat disamping sebagai utusan raja juga karena memiliki ilmu “kanuragan” yang membuat *bekel* ini disegani masyarakat “desa”. *Bekel* sendiri diberi tugas untuk memungut pajak/upeti warga “desa” kepada kerajaan, selain itu, dalam cara mempertahankan kekuasaan feodalistik, *bekel* sendiri diberi tanah *perdikan* dari kerajaan atas jasa-jasa pengabdianya dimana tanah itu merupakan cikal bakal berdirinya “desa” sehingga kian mengukuhkan posisi *bekel* sebagai patron.

Munculnya berbagai macam institusi seperti halnya “balai desa”, “sekolah desa”, “kas desa”, “dewan desa”, dan lain sebagainya dirasa sebagai wujud kepedulian pemerintah kolonial Belanda untuk menghidupkan kembali unsur-unsur asli “desa”. Akan tetapi, disisi lainnya sangat jelas terlihat adanya pola pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial yakni memperkenalkan unsur baru ke dalam “desa” yang belum tentu sesuai dengan keadaan “desa”. Selain itu, pembentukan “desa” di berbagai daerah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dengan cara *regrouping* beberapa persekutuan wilayah menjadi “desa” sendiri juga menemui polemik yakni tercerabutnya akar sosial budaya dari “desa” sehingga menimbulkan krisis identitas. Dalam hal ini, cara yang dilakukan pemerintah kolonial mengenai pengaturan “desa” lebih didasarkan pada keterpaksaan untuk menuruti

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, (Jakarta: Yayasan TIFA, 2005), hlm. 448.

⁷ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov Press, 2013).

politik etis yang salah satu tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat kolonial sehingga menyebabkan pemerintah kolonial “asal-asalan” dalam mengatur “desa”.

Adapun pengaturan pengaruh negara tersebut juga berlanjut pada era republik, dimana negara masih memosisikan desa sebagai domain negara. Hal terpenting dalam menganalisa desa dalam konteks ini adalah kuatnya arus politisasi yang sedemikian kental di sana. Politisasi tersebut sangatlah erat kaitannya dengan upaya membangun *nation character building* di tingkat pedesaan. Hal yang terpenting adalah masuknya berbagai macam kekuatan politik ke akar rumput. Basis afiliasi kerja ekonomi menjadi dalil atas terbentuknya politik aliran tersebut. Kondisi tersebut kemudian menjadikan ekonomi menjadi pembentuk politik aliran di pedesaan. Pola liberalisasi “desa” kemudian menjadikan “desa” bukan lagi entitas sosial namun menjerus ke arah politik. Hal itu bisa ditunjukkan dengan adanya strategi pembentukan organisasi *underbouw* partai politik untuk menjaring pemilih “desa” seperti persatuan pamong desa (PNI), aliansi buruh tani (PKI), ulama (NU), dan serikat dagang (Masyumi) sehingga mengakibatkan pola *cleavages* antar penduduk “desa”. Kedua strategi pendekatan kepada kepala “desa” sehingga posisi kepala “desa” sendiri tidak netral dan malahan membawa pada kontestasi sosial politik yang ada. Adapun strategi penerapan prinsip otonomi murni kepada desa sendiri lebih diartikan ketidaksiapan kapasitas negara dalam mengatur “desa” karena masih dalam konteks perang kemerdekaan sehingga dengan menempatkan kembali desa sebagai “republik mini”, maka desa akan mudah untuk mengatur dirinya dan mengorganisir diri sebelum kemudian “diatur” negara.

Oleh karena itu, cara instrumentasi yang digunakan untuk mengikat loyalitas “desa” kepada negara. Maka negara kemudian memaksakan prinsip selain Nasionalisme, Agama, Komunis yakni Manifesto Politik kepada perangkat “desa” untuk dijabarkan dalam pola perilaku pemerintahan “desa”. Kemudian selain itu pula, semua perangkat “desa” adalah birokrat yang ditunjuk dan diangkat dari lembaga supra desa di atasnya, sehingga mereka hanya menjalankan mandat dari lembaga supra desa

untuk menyelenggarakan rumah tangga “desa” dan menyebarkan ajaran Nasionalisme, Agama, Komunisme ke masyarakat “desa”. Melalui strategi administrasi dan institusionalisme, negara mulai hadir dengan wajah baru dalam pengaturan desa seperti munculnya Lembaga Pembinaan Masyarakat Desa sebagai ganti Lembaga Masyarakat Desa, Dewan Perwakilan Desa (Bandes), pengaktifan Babinsa dalam rangka menjaga teritorial, dan menempatkan sekdes sebagai birokrat sekaligus agen spionase negara. Akan tetapi, “desa” juga tidak mau kalah dengan mengaktifkan kembali berbagai macam institusi desa untuk mengimbangi negara. Sehingga seringkali muncul dualisme dalam desa seperti halnya pengakuan hukum adat dan positif nasional, komunalisasi tanah dan privatisasi tanah, dan lain sebagainya.

Adapun berbagai macam strategi dilakukan seperti halnya *floating mass* yakni untuk program depolitisasi menjauhkan “desa” dari kontestasi politik yang ada dan menghindari politik praktis agar lebih memikirkan pembangunan. Program revolusi hijau dan biru, penegakan panca usaha tani, dan kelompokcapir ditujukan untuk memaksimalkan perekonomian agraris “desa” dan penerjuran Babinsa dan AMD (ABRI Manunggal Desa) adalah untuk memastikan tidak adanya gangguan keamanan selama program pembangunan dijalankan serta berfungsi agensi pemerintah untuk memperlancar proses pembangunan.

Cara intervensionisme negara yang lain ditunjukkan dengan penyerahan urusan kepada “desa” sebanyak 31 macam dalam rangka memenuhi tugas desentralisasi. Padahal, hal itu belum tentu dengan kapasitas “desa” dan juga akan memberatkan beban desa dikarenakan desa mengalami beban ganda antara pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan tugas “negara”. Selain itu, dalam PP 72 tahun 2005 mengatakan bahwa “desa” merupakan entitas subsistem pembangunan dimana “pola pembangunan desa” sendiri merupakan kepanjangan dari RJPM Desa sehingga desa tidak memiliki otonomi dalam merumuskan pembangunannya. Walaupun demikian, “desa” diberikan desentralisasi fiskal sebagai wujud perimbangan keuangan antara desa dan negara.

Jika kita bisa menelaah secara lebih dalam, bahwa pengaturan desa di Indonesia mengalami fluktuasi yang berbeda-beda dalam setiap periodisasi rezim pemerintah. Fluktuasi tersebut lebih dikarenakan karena suasana politik Indonesia yang sepenuhnya stabil seperti sekarang ini sehingga cara-cara lama pengaturan desa di masa kolonial “sedikit” diulangi dalam produk legislasi yang dibuat pemerintah. Oleh karena itu, desa di masa pascakemerdekaan menjadi kelinci percobaan penerapan kebijakan publik yang sifatnya *top down* sehingga warga desa sendiri tidak pernah mengenyam otonomi dalam arti sebenarnya, walaupun hanya sebentar pada awal-awal kemerdekaan. Pemaknaan desa sebagai *local state government* menjadi legitimasi pemerintah untuk menunjukkan eksistensinya sebagai negara, namun bagi masyarakat desa hal itu tak ubahnya sebagai bentuk aksi represif dan koersif pemerintah kepada masyarakat desa.

Pola repetisi tersebut menunjukkan bahwa negara sedikit memahami makna otonomi sebenar-benarnya karena masalah otonomi maupun kedaulatan merupakan milik negara bukan desa sebagai entitas lokal yang terlebih dulu memiliki otonomi sebelum lahirnya negara. Sehingga diibaratkan kehadiran negara dengan produk legislasinya merupakan bentuk “penjajahan” baru negara terhadap desa.

Dalam era sekarang, kita bisa melihat dimensi desa sebagai *local state government* sendiri mulai tereduksi. Terlebih lagi selama dalam masa penerapan otonomi daerah dalam konteks kekinian. Kita bisa melihat bahwa adanya revitalisasi atas bangkitnya unsur-unsur lokal untuk diafirmasi dan direkognisi. Penguatan itu dilakukan dengan cara memberikan penguatan pada entitas kultural lokal setempat seperti halnya “Gampong” di Aceh, “Banjar” di kawasan Kalimantan Barat, dan juga “Nagari”. Adanya upaya penguatan berbagai kelembagaan lokal tersebut merupakan upaya untuk mereduksi atas pengaruh uniformisasi desa yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru selama berkuasa.

Global Meet Local: Pengaruh Globalisasi di Pedesaan

Pertautan antara unsur global dengan unsur lokal sendiri acap kali disebut sebagai glokalisasi.

Glokalisasi diandaikan sebagai arena besar yang memberikan deliberasi dan ruang partisipatoris besar bagi setiap komunitas lokal untuk bisa eksis di dunia global. Hal terpenting dalam mengelaborasi mengenai glokalisasi tersebut adalah rekognisi dan ruang afirmasi besar. Unsur lokal ingin mendapatkan rekognisi sekaligus representasi dalam ruang global tersebut.

Namun di satu sisi, kita melihat bahwa kekuatan global sebagai kekuatan suprematif sendiri memiliki kekuatan besar untuk menekan unsur lokal melalui serangkaian bentuk infiltrasi pengaruh terhadap unsur lokal tersebut. Adapun pedesaan sendiri merupakan entitas terkecil dari kekuatan lokal tersebut sehingga menjadikan desa sendiri menjadi rawan untuk menjadi area pengaruh tersebut. Desa akan menjadi pemain penting bilamana menjadi aktor mampu mengendalikan percaturan global tersebut. Namun demikian, desa juga berperan menjadi *loser* dalam arena global tersebut apabila gagal dalam memanfaatkan momentum tersebut.

Sekali lagi, konteks menang atau kalah bukanlah menjadi *lokus* utama dalam membahas hal tersebut, namun yang menjadi penting adalah kebijakan. Desa adalah urutan terbawah dari akar rumput yang akan terkena dampak langsung dari kebijakan-kebijakan hasil kreasi baik global maupun lokal. Asumsi adanya *global villages* seperti yang dikatakan oleh Robertson bahwa globalisasi sebenarnya adalah manifestasi dari sebuah proses interdependensi untuk menyatukan semua entitas lokal dalam kesatuan global⁸. Namun demikian, *global villages* sendiri tidak akan berjalan maksimal jika kapital yang masuk justru mengabsorpsi sumber daya ekonomi desa sehingga menjadikan desa sendiri kemudian termarjinalkan.

Maka membicarakan permasalahan implikasi globalisasi terhadap konteks pedesaan sendiri terletak pada pengaruhnya dalam memberikan dampak struktur ekonomi politik desa. Dewasa ini, kearifan lokal yang selama ini menjadi modal sosial yang berkembang di desa perlahan mulai menipis dikarenakan *westernisasi* dan liberalisasi sosial budaya yang

⁸ R Roland Robertson (Eds.), *Global Modernities*, (London: Sage Publication, 1997), hlm. 70.

sedemikian akut di kawasan desa. Desa secara perlahan mengalami urbanisasi dikarenakan aglomerasi ekonomi yang sedemikian cepat dan berkembang sehingga menjadikan involusi ekonomi basis tradisional di pedesaan. Secara perlahan, ekonomi desa mulai bergeser dari ekonomi padat karya menjadi padat modal yakni beralihnya lahan pertanian menjadi lahan industrialisasi global.

Temuan penting dalam menganalisa dampak globalisasi di pedesaan adalah kapitalisasi oleh pemodal yang kemudian menimbulkan adanya berbagai macam resistensi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lokal di sana. Hal terpenting dalam menganalisa resistensi tersebut adalah bagian dari respons pembangunan ekonomi yang tidak memihak. Tesis *trickle down effect* yang sejatinya menempatkan unsur kapital global itu nantinya akan merembes hingga bawah, pada akhirnya justru yang terjadi adalah *trickle up effect* yakni kapital desa justru diangkat dalam konstelasi global, sehingga menimbulkan dampak yang kaya makin kaya, sedangkan yang miskin makin miskin.

Konteks resistensi di sini adalah perlawanan oleh kaum desa yang biasanya dilakukan petani dalam mempertahankan kepemilikan sumber daya ekonomi yang mereka punyai. Sejarah mencatat bahwa perlawanan terhadap rezim global di tingkat desa sendiri banyak terjadi di berbagai tempat dunia yang tergantung pada konteks ideologis apa yang mereka artikulasikan. Secara mayoritas, resistensi sendiri dilakukan banyak terjadi di kasus negara Dunia Ketiga dengan *major issue* yang dikedepankan adalah isu ekologis dan developmentalisme. Ekologis sendiri terkait dengan adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan pola eksplorasi maupun eksploitasi secara masif oleh para pemodal terhadap kegiatan mereka di sana. Implikasinya adalah kerusakan permanen terhadap jumlah sumber daya ekonomi lokal yang selama ini menjadi penyokong kegiatan perekonomian ekstraktif warga.

Berbagai kasus yang mengatasnamakan resistensi masyarakat petani di desa sendiri diinisiasi oleh gerakan NBA (*Narmada Bachao Andolan*) yang terjadi di kawasan India yang saat itu menentang adanya pembangunan dam yang

intinya akan mengubah pembangunan sawah di sana. Masih di kawasan yang sama, resistensi melawan kapital global juga dialamatkan pada kasus perusakan hutan di kawasan Chipko, India.⁹ Hal itu kemudian menghasilkan adanya gerakan-gerakan memeluk pohon yang dialamatkan oleh kelompok masyarakat petani di sana sebagai bentuk perlawanan petani sebagai jalan akhir menghalangi eskavator menghancurkan lahan pertanian di sana.

Kasus lain yang menarik untuk dikaji adalah sejarah perlawanan yang dilakukan oleh kelompok Zapatista yang berada di kawasan Amerika Latin. Zapatista adalah gerakan petani yang menolak keras adanya privatisasi lahan pertanian publik desa untuk kemudian dikonversikan dengan lahan pertanian korporasi. Adanya alih fungsi lahan yang dilakukan sepihak itulah yang menimbulkan adanya perlawanan keras dari petani yang kemudian menimbulkan perlawanan masif dengan koalisi pemerintah bersama korporat.

Desa di Indonesia dalam Konstelasi Global

Adapun dalam kasus Indonesia sendiri, pengaruh globalisasi sendiri dapat dikategorisasikan menjadi dua bagian yakni antara *soft influence* maupun juga *hard influence*. Dikotomi tersebut mengindikasikan adanya pengaruh globalisasi dalam desa sendiri tidak selalu berada dalam sisi antagonisme. Pemaknaan mengenai *soft influence* sendiri dapat diartikan sebagai bentuk afirmasi desa terhadap pengaruh global yang ditunjukkan dengan strategi desa dalam merangkul pengaruh global guna mengukuhkan eksistensi maupun survivalitasnya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *hard influence* sendiri lebih dimaknai adanya intervensi yang terlalu menekan terhadap kehidupan desa sehingga menjadikan desa sendiri berada dalam posisi rentan.

Perbincangan mengenai pemaknaan desa dari segi *soft influences* lebih dimaknai dalam bentuk kerjasama yang dilakukan oleh desa untuk memperkenalkan potensi desanya agar lebih dikenal di dunia luar. Model pengembangan

⁹ Wasisto Raharjo Jati, *Pengantar Kajian Globalisasi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm.155.

desa yang sedemikian diaktualisasikan dalam bentuk kerjasama pariwisata maupun kerjasama ekonomi. Adapun dalam klausul kerjasama ekonomi yang diajukan sebenarnya lebih banyak pada proses ekonomi kreatif dan mandiri. Sedangkan dalam bentuk *hard influences* sendiri lebih mengarahkan kepada bentuk eksploitasi terhadap perekonomian desa baik itu berupa alih fungsi kepemilikan sumber daya ekonomi maupun lain sebagainya.

Perbincangan mengenai *soft influences* sendiri terkait dengan upaya memperbaiki karakter ekonomi pedesaan dengan cara mengaplikasikan teknologi dan pembangunan kreatif lewat industri pariwisata. Hal inilah yang kemudian mendorong terciptanya berbagai macam program desa wisata yang digulirkan di berbagai daerah Indonesia. Penguatan menjadi desa wisata ini pada dasarnya merupakan bentuk revitalisasi ekonomi desa agar tidak hanya hidup subsisten dengan ekonomi agraris semata. Revitalisasi maupun transformasi desa agraris menjadi desa wisata pada dasarnya menguatkan faktor komplementer dari ekonomi agraris yakni suasana alam yang belum dioptimalkan secara penuh menjadi potensi motivator ekonomi.

Komoditisasi adanya alam rural yang masih perawan inilah yang kemudian mendorong kreativitas dalam menggali internet untuk menjadi ajang promosi. Adanya infiltrasi global melalui internet inilah yang kemudian menjadikan promosi desa wisata menjadi cepat tersebar. Disamping pula, peran aktif pemerintah daerah setempat dalam mendorong setiap potensi ekonomi penduduknya tersebut. Adapun mekanisme inisiasi dalam mempertautkan unsur global ke dalam kultur pedesaan yakni dengan menguatkan adanya peran *community development* baik itu melalui forum PNPM Pariwisata maupun juga Musrenbang melalui hubungan tripartit antara pemerintah dengan pelaku sektor pariwisata. Namun juga bisa melalui cara pembangunan secara partisipatoris melalui hubungan bipartit dengan pelaku wisata. Dalam kasus desa wisata maupun desa *cyber* ini banyak diaplikasikan melalui pengembangan desa-desa baik di Jawa maupun luar Jawa. Hanya saja dalam pengembangan desa wisata perlu juga diperhatikan mengenai konteks kesesuaian

dengan potensi wisata alam yang perlu dijual. Artinya di sini diperlukan adanya penguatan kerjasama yang dilakukan hubungan tripartit antara pelaku pariwisata, pelaku lokal, dengan pemerintah itu sendiri.

Sedangkan pengaruh globalisasi ke dalam ranah desa yang berupa pengaruh berat (*hard influences*) lebih banyak menyoal pada perilaku eksploitasi maupun eksplorasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam sumber daya ekonomi desa. Dalam taraf ini, posisi desa bukanlah dimaknai sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi global. Namun justru diposisikan sebagai satelit perekonomian bagi negara maupun kapitalis swasta dalam pembangunan ekonominya. Tidak jarang kemudian adanya pola represif yang dilakukan aparatus negara sendiri berujung konflik dengan para pemuka desa yang tetap ingin mempertahankan adanya ekologi wilayahnya.

Konflik yang mengemuka antara desa *vis a vis* negara maupun swasta sendiri berujung pada kerusuhan komunal di berbagai tempat baik itu memakan korban jiwa ataukah tidak. Dalam berbagai macam konstelasi politik yang menyangkut konflik sumber daya alam selalu melibatkan adanya gerakan perlawanan yang melibatkan para petani maupun kelompok pedesaan. Berbagai bentuk resistensi tersebut hadir dan termanifestasikan dalam berbagai macam bentuk pola dan demonstrasi tersebut. Secara makro, globalisasi memang memberikan implikasi dikotomis terhadap perkembangan desa antara positif dengan negatif. Semuanya itu tergantung pada pemaknaan desa dalam konstelasi global sekarang ini, apakah globalisasi itu dihadirkan sebagai peluang ataukah tantangan. Semuanya itu nanti berpulang pada pemangku dan pembuat kebijakan mengenai desa dan globalisasi terkait dengan usaha survivalitas dan durabilitas desa dalam memanfaatkan sebagai globalisasi.

Penutup

Perbincangan mengenai pengaruh global dalam pedesaan sendiri perlu dimaknai secara mendalam terkait pengaruhnya kepada kehidupan masyarakat. Secara dikotomis, pengaruh globalisasi terhadap desa sendiri dimaknai

dalam dua perspektif yakni positif dan negatif. Jika merunut pada dramaturgi historis, masuknya globalisme ke dalam pedesaan sendiri dimaknai sebagai entitas yang negatif. Hal ini dikarenakan kuatnya mazhab developmentalisme yang berkembang sehingga menjadikan desa sebagai subordinasi dari sebuah rezim ekonomi. Oleh karena itulah, sejarah globalisme di pedesaan sendiri didominasi oleh sejarah resistensi yang dilakukan oleh kalangan petani maupun kalangan marjinal lainnya.

Adapun dalam zaman global sekarang ini, adanya terminologi desa wisata maupun desa *cyber* sendiri pada dasarnya merupakan bentuk revitalisasi desa dengan memberdayakan unsur alamnya maupun unsur ekstratif lainnya. Hal inilah yang menjadi modal dan motivasi penting dalam menjadikan desa bukan sebagai objek yang diabsorpsi secara ekonomis. Namun justru menjadi mitra dimana desa adalah mitra sekaligus subjek penting dalam pembangunan ekonomi.

Daftar Pustaka

Buku

- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian*. Jakarta: Bharata Aksara.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2013. *Pengantar Kajian Globalisasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov Press.
- Ostrom, Ellinoir. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.

Robertson, Roland (Eds.). 1997. *Global Modernities*. London: Sage Publication.

Sihbudi, Riza & Nurhashim, Moch, (Eds.). 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia : Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*. Jakarta: Grasindo.

Sosialismanto, Duto. 2006. *Hegemoni Negara: Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Lajera Pustaka Utama.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Jakarta: Yayasan TIFA.

Jurnal

Hardin, Garret. 1968. "Tragedy of The Commons". *Science New Series* 162 (3859).